



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 280 TAHUN 2020

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 280 TAHUN 2020

Tanggal 3 Maret 2020

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN : 2020

A. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaminnya akses dan layanan Pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,80
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00 %
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	3,18%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Jumlah titik genangan banjir	6
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Cakupan pelayanan air bersih	66,09%
		2	Persentase penurunan volume sampah di kota	20%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga	1	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (<i>Public Transportation Modal Share</i>)	25%
8	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Realisasi Nilai Investasi	Rp 107,8 triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Nilai/Predikat AKIP	A
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
		3	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Terwujudnya Kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	147 RW

B. Program dan Sumber Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	74.546.796.094	APBD
2	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	15.361.661.361	APBD
3	Program Wajib Belajar 12 Tahun	3.196.860.981.380	APBD
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	87.740.312.249	APBD
5	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.487.721.643.914	APBD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.308.049.493.364	APBD
7	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	34.987.969.111	APBD
8	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	2.379.030.950.000	APBD
9	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	2.970.875.603.377	APBD
10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	82.671.245.840	APBD
11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1.559.956.696.522	APBD
12	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan	865.385.136.366	APBD
13	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	26.563.336.348	APBD
14	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	680.580.698.600	APBD
15	Program Pemberdayaan Masyarakat	482.553.935.353	APBD
16	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	11.402.096.215	APBD
17	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	103.723.671.629	APBD
18	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	3.138.208.000	APBD
19	Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan	2.425.315.517	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	34.877.050.508	APBD
21	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	154.143.103.306	APBD
22	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	30.170.700.865	APBD
23	Program Penanganan Fakir Miskin	59.363.057.413	APBD
24	Program Pengendali Banjir dan Abrasi	2.746.792.247.998	APBD
25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	208.641.464.822	APBD
26	Program Pengelolaan Persampahan	2.025.228.045.750	APBD
27	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	663.076.713.846	APBD
28	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	344.873.074.289	APBD
29	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	74.886.984.368	APBD
30	Program Peningkatan Penanaman Modal	7.718.737.692	APBD
31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	126.412.372.242	APBD
32	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	17.405.799.880	APBD
33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	22.815.994.141	APBD
34	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.845.355.712	APBD
35	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.446.039.737	APBD
36	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	92.187.819	APBD
37	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra	137.100.000	APBD
38	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	370.250.000	APBD
39	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian	125.300.000	APBD
40	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH	109.200.000	APBD
41	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Wilayah	7.957.970.736	APBD
42	Program Pengelolaan Pemakaman	362.960.270.749	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
43	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	11.330.233.183	APBD
44	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun	44.732.416.304	APBD
45	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	154.280.655.881	APBD
46	Program Penataan Administrasi Kependudukan	117.077.719.367	APBD
47	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	2.689.127.752	APBD
48	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	189.123.661.613	APBD
49	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara	363.485.596.228	APBD
50	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	383.468.853.275	APBD
51	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	3.339.053.121	APBD
52	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	228.869.037.869	APBD
53	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	2.000.009.023	APBD
54	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	167.532.315.136	APBD
55	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	273.397.728.552	APBD
56	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.336.823.418	APBD
57	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	224.868.443.839	APBD
58	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	534.119.444.674	APBD
59	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur	301.181.161.088	APBD
60	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur	3.087.575.591	APBD
61	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur	496.337.930.310	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
62	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	3.539.799.040	APBD
63	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	9.593.081.102	APBD
64	Program Peningkatan Pengeinbangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	59.775.407.012	APBD
65	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	180.781.300	APBD
66	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	1.164.912.288	APBD
67	Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual	8.166.230.191	APBD
68	Program Pemanfaatan Aset Daerah	435.469.500	APBD
69	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	57.120.515.982	APBD
70	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	426.403.679.577	APBD
71	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	36.445.097.375	APBD
72	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	7.470.974.395	APBD
73	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18.035.505.826	APBD
74	Program Penataan Kawasan Permukiman	797.107.302.192	APBD



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN